

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam tata kelola sektor publik, pengelolaan keuangan pemerintah daerah memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Keuangan daerah tidak lagi dipahami hanya sebagai aktivitas administratif yang berkaitan dengan pencatatan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menilai kualitas tata kelola pemerintahan. Melalui pengelolaan keuangan yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu menggunakan sumber daya publik secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Tuntutan terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan, menyusun anggaran, menetapkan prioritas belanja, serta mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan daerah kepada publik. Kewenangan tersebut memberikan peluang bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kebutuhan dan karakteristik wilayah masing-masing. Namun, kewenangan yang besar juga menuntut kemampuan pengelolaan keuangan yang memadai agar anggaran daerah benar-benar dapat digunakan untuk mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan daerah masih menghadapi berbagai persoalan. Beberapa persoalan yang sering muncul antara lain temuan audit, inefisiensi anggaran, kelemahan sistem pengendalian internal, ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi anggaran, serta belum optimalnya pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Dalam konteks ini, akuntansi sektor publik memiliki peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan, andal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar untuk menilai kinerja pemerintah daerah (Mardiasmo, 2018).

Secara teoretis, persoalan pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan melalui Agency Theory. Dalam perspektif ini, masyarakat, pemerintah pusat, legislatif, dan lembaga pengawas dapat dipandang sebagai pihak yang memberikan mandat, sedangkan pemerintah daerah berperan sebagai pihak yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya publik. Hubungan tersebut berpotensi menimbulkan asimetri informasi apabila pemerintah daerah tidak menyajikan informasi keuangan secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, mekanisme pelaporan, pengawasan, dan pengendalian diperlukan untuk meminimalkan risiko inefisiensi, penyimpangan, serta lemahnya pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan daerah (Riswan & Affandi, 2014).

Namun, hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat tidak hanya dapat dilihat dari sisi konflik kepentingan. Melalui *Stewardship Theory*, pemerintah daerah juga dipandang sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat. Perspektif ini menekankan bahwa pemerintah daerah seharusnya tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga pada komitmen untuk menghasilkan manfaat publik melalui penggunaan anggaran yang optimal, bertanggung jawab, dan berkelanjutan (Padang & Padang, 2023).

Berdasarkan perspektif tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola keuangan publik secara baik. Kinerja keuangan tidak hanya mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan anggaran, tetapi juga menunjukkan kemampuan dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja, mengendalikan penggunaan anggaran, serta mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada publik. Hal ini sejalan dengan konsep value for money dalam akuntansi sektor publik yang menekankan pentingnya prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya publik (Mardiasmo, 2018).

Meskipun demikian, kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia masih menunjukkan perbedaan antar daerah. Perbedaan tersebut dapat terjadi karena setiap daerah memiliki kapasitas fiskal, struktur ekonomi, karakteristik

wilayah, kemampuan kelembagaan, serta prioritas pembangunan yang tidak sama. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, pemerintah daerah memang memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan daerahnya masing-masing. Akan tetapi, tidak semua daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengoptimalkan sumber pendapatan, mengendalikan belanja, dan menjaga kualitas pertanggungjawaban keuangan.

Perbedaan kemampuan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah perlu dikaji dalam konteks wilayah tertentu. Setiap daerah memiliki dinamika fiskal yang berbeda, sehingga hasil pengelolaan keuangan daerah tidak dapat digeneralisasi secara sederhana. Daerah dengan potensi ekonomi besar belum tentu memiliki kinerja keuangan yang lebih baik apabila pengelolaan anggarannya belum efisien. Sebaliknya, daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih terbatas tetap dapat menunjukkan pengelolaan keuangan yang relatif baik apabila mampu menjaga keseimbangan antara pendapatan, belanja, dan akuntabilitas pelaporan keuangan.

Dalam penelitian ini, Provinsi Lampung dipilih sebagai objek kajian karena memiliki karakteristik ekonomi dan fiskal yang relevan dengan isu pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Lampung merupakan daerah yang berada dalam proses penguatan kapasitas fiskal dan kemandirian daerah. Jika dibandingkan dengan provinsi yang memiliki basis ekonomi kuat seperti DKI Jakarta dan Jawa Barat, kontribusi pendapatan daerah Lampung masih relatif tertinggal. Namun, Lampung memiliki potensi ekonomi yang cukup berkembang, terutama dari sektor pertanian, perdagangan, jasa, pariwisata, dan aktivitas ekonomi daerah perkotaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Lampung memiliki peluang untuk meningkatkan kapasitas fiskal sekaligus memperbaiki kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Selain itu, kabupaten/kota di Provinsi Lampung memiliki perbedaan karakteristik ekonomi, kapasitas pendapatan, dan kebutuhan belanja daerah. Terdapat daerah perkotaan yang memiliki aktivitas ekonomi lebih padat dan basis penerimaan lebih besar, sementara daerah non-perkotaan cenderung menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Kondisi tersebut menjadikan Lampung relevan untuk dikaji karena kinerja keuangan pemerintah

daerah tidak hanya berkaitan dengan besar kecilnya pendapatan, tetapi juga dengan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola belanja dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara efisien.

Selain perbedaan kapasitas pendapatan daerah, Provinsi Lampung juga perlu dilihat dari sisi pengalokasian belanja daerah. Belanja modal memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, dan pembentukan aset daerah yang memberikan manfaat jangka panjang. Namun, besarnya belanja modal tidak otomatis menunjukkan peningkatan kinerja keuangan apabila tidak diikuti oleh perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang efektif. Dalam konteks rasio efisiensi, belanja modal perlu dikelola secara proporsional agar realisasi belanja tidak menimbulkan tekanan terhadap pendapatan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah perlu diimbangi dengan pengelolaan belanja yang produktif dan efisien agar dapat mendukung perbaikan kinerja keuangan pemerintah daerah (Angelina et al., 2020).

Di sisi lain, kualitas laporan keuangan juga menjadi aspek penting dalam memahami kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Lampung. Meskipun sebagian besar pemerintah daerah telah memperoleh opini WTP, pencapaian tersebut belum tentu sepenuhnya mencerminkan optimalnya pengelolaan keuangan daerah. Masih adanya variasi dalam sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan perlu dilihat sebagai bagian dari tata kelola keuangan yang dapat memengaruhi hubungan antara PAD, belanja modal, dan kinerja keuangan.

Dalam perspektif Teori Desentralisasi Fiskal, PAD memiliki peran penting karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan lokal untuk membiayai pembangunan serta pelayanan publik. Semakin tinggi PAD yang dimiliki daerah, semakin besar pula ruang fiskal pemerintah daerah dalam menentukan prioritas anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal dan memperkuat kemandirian fiskal daerah. Namun,

dalam perspektif Agency Theory, pengelolaan PAD juga menuntut transparansi dan akuntabilitas karena pemerintah daerah sebagai agen memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efisien dan mempertanggungjawabkannya kepada masyarakat sebagai prinsipal (Riswan & Affandi, 2014).

Secara konseptual, PAD memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD yang tinggi memberikan fleksibilitas fiskal bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Namun, peningkatan PAD tidak secara otomatis menghasilkan kinerja keuangan yang lebih baik apabila pendapatan tersebut tidak dikelola secara efektif. Kelemahan dalam perencanaan anggaran, rendahnya efisiensi pengelolaan, serta lemahnya pengawasan dapat menyebabkan peningkatan pendapatan tidak sepenuhnya berdampak pada perbaikan kinerja keuangan (Maharani et al., 2025).

Oleh karena itu, pengaruh PAD terhadap kinerja keuangan tidak hanya ditentukan oleh besarnya penerimaan, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan pendapatan tersebut secara produktif. PAD yang bersumber dari pendapatan yang stabil, seperti pajak daerah dan retribusi daerah, cenderung memiliki kontribusi yang lebih kuat terhadap kesinambungan fiskal dibandingkan pendapatan yang bersifat insidental. Dengan demikian, PAD perlu dipahami bukan hanya sebagai ukuran kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan, tetapi juga sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam membiayai belanja yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan PAD perlu diikuti oleh kemampuan mengalokasikan sumber daya tersebut secara tepat. Dalam konteks ini, belanja modal menjadi salah satu bentuk pemanfaatan keuangan daerah yang memiliki orientasi jangka panjang. Belanja modal tidak hanya dipahami sebagai pengeluaran anggaran, tetapi juga sebagai investasi pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur, penyediaan fasilitas publik, serta pembentukan aset tetap yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Meskipun belanja modal memiliki peran strategis dalam mendorong pembangunan daerah, dalam praktiknya alokasi belanja modal sering kali belum memperoleh porsi yang proporsional dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Banyak pemerintah daerah masih lebih berfokus pada belanja operasional yang bersifat rutin, seperti belanja pegawai dan administrasi, dibandingkan belanja yang bersifat produktif. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai sejauh mana anggaran daerah telah diarahkan untuk mendukung pembangunan jangka panjang dan peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah.

Dalam perspektif *Stewardship Theory*, belanja modal dapat dipahami sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan infrastruktur, fasilitas publik, dan pelayanan yang lebih baik (Padang & Padang, 2023). Namun, dalam kerangka *Agency Theory*, belanja modal juga berpotensi menjadi area yang rentan terhadap inefisiensi, pemborosan, dan penyimpangan karena melibatkan proyek serta alokasi anggaran dalam jumlah besar. Oleh karena itu, kontribusi belanja modal terhadap kinerja keuangan sangat bergantung pada kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran (Riswan & Affandi, 2014).

Secara konseptual, belanja modal memiliki hubungan positif dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal yang dialokasikan secara tepat diharapkan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi daerah, memperluas basis pajak, memperbaiki pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan pendapatan daerah pada masa mendatang. Dengan demikian, belanja modal dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kinerja keuangan pemerintah daerah.

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa hubungan antara belanja modal dan kinerja keuangan tidak selalu berjalan sesuai dengan asumsi teoritis. Sejumlah penelitian menemukan bahwa belanja modal tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam beberapa kasus, peningkatan belanja modal justru tidak diikuti oleh peningkatan kinerja, yang mengindikasikan adanya persoalan dalam efektivitas perencanaan,

pelaksanaan, maupun pengawasan anggaran (Angelina et al., 2020; Yudiastuti et al., 2025).

Ketidakkonsistenan tersebut menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak cukup dijelaskan hanya melalui aspek kuantitatif, seperti besarnya PAD dan belanja modal. Diperlukan pula perhatian terhadap aspek kualitatif dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama kualitas laporan keuangan. Jika PAD dan belanja modal menggambarkan kapasitas dan penggunaan sumber daya keuangan, maka kualitas laporan keuangan mencerminkan sejauh mana informasi keuangan disajikan secara transparan, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif akuntansi sektor publik, kualitas laporan keuangan menjadi fondasi penting dalam menilai akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif, tetapi juga sebagai dasar bagi proses pengawasan, evaluasi kebijakan, dan pengambilan keputusan. Secara konseptual, laporan keuangan pemerintah daerah harus memenuhi karakteristik kualitatif sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Apabila informasi keuangan yang disajikan tidak andal, maka kebijakan yang dihasilkan berpotensi tidak tepat sasaran dan pada akhirnya dapat melemahkan kinerja keuangan daerah (Purwati et al., 2024).

Dalam kerangka *Agency Theory*, kualitas laporan keuangan berperan penting dalam mengurangi asimetri informasi antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai *principal*. Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel memungkinkan proses pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah berjalan lebih efektif, sehingga dapat meminimalkan risiko inefisiensi dan penyimpangan (Riswan & Affandi, 2014).

Peran tersebut menjadi relevan karena kinerja keuangan pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh besarnya PAD dan belanja modal, tetapi juga oleh kualitas informasi keuangan yang digunakan dalam proses pengelolaan dan evaluasi anggaran. PAD yang tinggi tidak selalu menghasilkan kinerja keuangan

yang baik apabila tidak dikelola secara transparan. Demikian pula, belanja modal yang besar belum tentu berdampak optimal apabila tidak didukung oleh pelaporan keuangan yang andal.

Oleh karena itu, kualitas laporan keuangan dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel moderasi. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memperkuat pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan karena mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengawasan anggaran. Sebaliknya, kualitas laporan keuangan yang rendah dapat melemahkan hubungan tersebut karena berpotensi menimbulkan bias informasi dan ketidaktepatan dalam penilaian kinerja.

Dalam praktiknya, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sering dikaitkan dengan opini audit BPK, seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun, opini WTP tidak selalu menunjukkan bahwa seluruh aspek pengelolaan keuangan telah berjalan optimal, karena masih dapat ditemukan kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan terhadap regulasi, dan permasalahan aset. Kondisi ini juga relevan dalam konteks Provinsi Lampung, di mana opini WTP belum sepenuhnya menutup kemungkinan adanya variasi kualitas tata kelola keuangan antar daerah.

Dengan demikian, kualitas laporan keuangan penting digunakan sebagai variabel moderasi untuk menjelaskan mengapa peningkatan PAD dan belanja modal tidak selalu diikuti oleh peningkatan kinerja keuangan. Melalui kualitas pelaporan yang baik, pendapatan dan belanja daerah dapat dikelola secara lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja modal, dan kinerja keuangan pemerintah daerah masih belum menunjukkan temuan yang konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan karena peningkatan PAD dapat memperkuat kapasitas fiskal, meningkatkan fleksibilitas anggaran, dan mendorong efisiensi pengelolaan keuangan daerah (Mukaiyaroh & Anik, 2025; Safitri et al., 2023; Anno et al., 2024; Wahyuni & Ali, 2024). Namun,

penelitian lain menunjukkan bahwa PAD tidak selalu berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, terutama apabila peningkatan pendapatan tidak diikuti oleh pengelolaan yang efektif dan alokasi anggaran yang produktif (Andjarwati et al., 2021; Arsallya, 2021).

Ketidakkonsistenan hasil penelitian juga terlihat pada variabel belanja modal. Secara teoritis, belanja modal dipandang sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kinerja keuangan melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan pembentukan aset daerah jangka panjang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah (Mubarok et al., 2022; Pramesti & Hendaris, 2025; Sukma & Hendaris, 2026). Akan tetapi, penelitian lain menemukan bahwa belanja modal tidak selalu memberikan pengaruh signifikan, terutama ketika alokasi dan implementasi anggaran belum dikelola secara efektif (Angelina et al., 2020; Jesika & Purnawati, 2025).

Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengaruh PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan tidak dapat dijelaskan hanya melalui hubungan langsung. Terdapat faktor lain yang berpotensi memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut, salah satunya adalah kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan, sehingga pendapatan dan belanja daerah dapat dikelola secara lebih tepat serta berorientasi pada peningkatan kinerja. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan berperan dalam memperkuat hubungan antara variabel keuangan dan kinerja pemerintah daerah (Chaerani & Firmansyah, 2024; Delang, 2024; Sukma & Hendaris, 2026).

Namun demikian, penelitian yang menempatkan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara PAD, belanja modal, dan kinerja keuangan pemerintah daerah masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menguji pengaruh langsung PAD dan belanja modal terhadap kinerja keuangan, tanpa mempertimbangkan bagaimana kualitas pelaporan keuangan dapat memperkuat atau memperlemah hubungan tersebut.

Selain itu, kajian yang secara khusus dilakukan pada daerah dengan karakteristik fiskal menengah seperti Provinsi Lampung juga masih belum banyak ditemukan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengisi kesenjangan penelitian dengan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, serta menempatkan kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderasi. Pemilihan Provinsi Lampung menjadi relevan karena daerah ini memiliki variasi kapasitas fiskal antar kabupaten/kota, ketimpangan PAD, serta dinamika pengelolaan belanja dan kualitas pelaporan keuangan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara kapasitas fiskal, alokasi belanja, kualitas pelaporan keuangan, dan kinerja keuangan pemerintah daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2018–2024.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibangun, maka penelitian ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang secara langsung berkaitan dengan hipotesis yang akan diuji secara kuantitatif. Pertanyaan penelitian berikut menjadi dasar konseptual dalam merumuskan hubungan antarvariabel utama dan moderasi dalam model penelitian:

- a. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung?
- b. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung?
- c. Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung?
- d. Apakah kualitas laporan keuangan mampu memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung?

- e. Apakah kualitas laporan keuangan mampu memoderasi pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berikut adalah tujuan penelitian yang disusun selaras dengan rumusan serta pertanyaan penelitian sebelumnya:

- a. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- b. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- c. Untuk menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- d. Untuk menganalisis peran kualitas laporan keuangan dalam memoderasi pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.
- e. Untuk menganalisis peran kualitas laporan keuangan dalam memoderasi pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi sektor publik, khususnya dalam kajian kinerja keuangan pemerintah daerah dengan menggunakan *Agency Theory* sebagai landasan konseptual. Penelitian ini memperkaya literatur dengan menjelaskan bahwa hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap kinerja keuangan tidak hanya bersifat langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh

kualitas laporan keuangan sebagai mekanisme akuntabilitas dalam hubungan keagenan antara pemerintah daerah dan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi empiris dengan menguji peran kualitas laporan keuangan sebagai variabel moderasi dalam hubungan antara variabel fiskal dan kinerja keuangan. Pendekatan ini masih relatif terbatas dalam penelitian sebelumnya, yang umumnya hanya berfokus pada hubungan langsung antar variabel tanpa mempertimbangkan peran kualitas pelaporan keuangan sebagai faktor penguat. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengembangan model analisis kinerja keuangan daerah, khususnya dalam konteks desentralisasi fiskal di negara berkembang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah.

Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja keuangan melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah serta pengelolaan Belanja Modal yang lebih efektif dan produktif. Selain itu, pentingnya kualitas laporan keuangan sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kepercayaan publik.

Bagi pemerintah pusat, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam merumuskan kebijakan yang mendorong peningkatan akuntabilitas dan kinerja keuangan daerah, khususnya melalui penguatan sistem pelaporan keuangan dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran daerah.

Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan model penelitian kuantitatif dengan pendekatan moderasi, khususnya dalam kajian akuntansi sektor publik, sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.